

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI BESAR KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR</p>	Nomor SOP	: B.79/BBKIPM.MKS/OT.310/I/2024
	Tanggal Pembuatan	: 4 Januari 2024
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 42 Januari 2024
	Disusun Oleh	: Tim PPID
	Disahkan Oleh	: Plt. Kepala BBKIPM Makassar
 Mohammad Zamrud		
SOP Uji Konsekuensi		
Tujuan	Sebagai Pedoman Dalam Uji Konsekuensi	
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 5. Permen KP No. 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Prosedur (SOP) 6. Kepmen KP No. 81/KEPMEN-KP/SJ//2014 Tentang Klasifikasi Informasi Yang di kecualikandiLingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2013Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 8. Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	
Keterkaitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 3. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 	
Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3. Mempunya communication skill 4. Kemampuan Pendokumentasian Informasi 	
Peringatan	-	
Peralatan/Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, laptop, ATK 2. Jaringan Internet 	
Pencatatan dan Pendataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Tamu/Agenda 2. Daftar Pemohon 	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID	Bidang Uji Konsekuensi PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan Kajian Atas Informasi yang Tidak termasuk Dalam Daftar Informasi Publik Dengan Melibatkan Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi	Mulai			Dokumen informasi publik, peraturan per UU an	3 hari	Konsep Kajian	
2.	Memberikan pertimbangan Terhadap Permohonan Informasi Publik Selain Informasi Publik yang ditetapkan Dalam DIP				Konsep Kajian	1 hari	Rekomendasi	
3.	Apabila Permohonan Uji Konsekuensi Diterima, Maka Informasi Publik Akan Dibuka. Jika Informasi Publik Ditolak Maka Akan Ditutup	Selesai	Ditolak		Dokumen informasi publik, peraturan per UU an	1 hari	Sura Penolakan	
4.	Menyusun Konsep Keputusan Untuk Menetapkan Informasi Yang Dikecualikan, Kemudian Menyampaikan Kepada Atasan PPID		Diterima		Konsep SK	14 hari kerja	Konsep Keputusan Atasan PPID/PPID	Dapat Berupa Keputusan PPID
5.	Menetapkan Keputusan Untuk Membuka Atau Menetapkan Informasi Yang Dikecualikan			Selesai	Konsep SK	1hari	Keputusan Atasan PPID	